Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP

Larasati Dwi Rizqiga^{1,*} Budi Arta Atmaja²

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

larasdrizqiga25@gmail.com¹ ; budi.arta@unpad.ac.id²

*Correspondence Author

Abstrak

Kasus penganiayaan tak henti-hentinya menjadi sorotan publik, tak hanya penganiayaan yang dilakukan secara spontan, namun juga yang direncanakan terlebih dahulu dan menimbulkan luka berat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP. Seperti yang kita ketahui, penganiayaan berencana sendiri merupakan salah satu tindak pidana. Di mana, terdapat dua unsur di dalamnya antara lain: *Actus Reus* yaitu suatu perbuatan yang menurut masyarakat tercela dan patut dihukum, dan *Mens Rea* atau niat jahat pelaku. Adapun keterkaitan keduanya dapat dilihat dalam bentuk ekspresi "*actus non reus facit reum nisi mens sit rea*". Secara konseptual, tergambar secara jelas penentuan niat jahat (*mens rea*) di dalam suatu perbuatan (*actus reus*) khususnya tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, namun nyatanya dalam tatanan implementasi, hal ini masih menjadi menimbulkan perdebatan, yaitu terdapat perbedaan penafsiran serta penerapan unsur *mens rea* dalam tindak pidana penganiayaan berencana. Di dalam penelitian ini akan dikaji mengenai penafsiran dan penerapan unsur *mens rea* pada tindak pidana penganiayaan berencana dari berbagai putusan, sehingga kesimpulan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai penentuan *mens rea* yang diterapkan pada masing-masing kasus, serta memberikan pemahaman dan saran guna menentukan parameter untuk mengukur mens rea pada perkara penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 353 ayat 2 KUHP.

Kata Kunci : Penganiayaan Berencana, Pasal 353 ayat 2 KUHP, Mens Rea, Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu.

Naskah dikirim: 17 Desember 2020|Direvisi: 1 Februari 2021|Diterbitkan: 13 Februari 2021

Abstract

Persecution cases, not just spontaneously but also planned and resulting in severe injury, regulated in Criminal Code (KUHP) Article 353 Paragraph 2, are continuously gaining public's

attention. As we have known, *Actus Reus* is an act that in society's perspectives are disgraceful be punishable. *Actus Reus* heavily related to *Mens Rea* or malicious intent of the perpetrators. Both connections can be seen in the expression of "*actus non reus facit reum nisi mens sit rea*". Conceptually, the malicious intent of perpetrators (*mens rea*) are clearly shown in an act (*actus reus*), especially a planned persecution crime that causing a heavy injury. But in real implementation, this case is still on debate. There are different interpretation and application of *mens rea* factor in planned persecution crimes. This research would examine the interpretation and application of *mens rea* factors in planned persecution crime from different verdicts, so the conclusion of this research will give clearer explanation to determine *mens rea* in each cases and give deeper understanding and suggestion to define a parameter to *mens rea* in severe injury-planned persecution crime based on Article 353 Paragraph 2.

Keywords: Planned persecution, Criminal Code (KUHP) Article 353 Paragraph 2, *Mens Rea*, Planned Persecution Crime.

Pendahuluan

Dapat kita soroti bahwa dewasa ini pemberitaan di media cetak sampai dengan media elektronik, tak henti-hentinya memperbincangkan permasalahan kejahatan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Kejahatan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang menyimpang, di mana perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di dalam suatu negara.¹ Kejahatan ini tentunya dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun, sehingga tentu dapat merugikan masyarakat, baik dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban.²

Salah satu kejahatan yang kerap kali terjadi di sekitar kita ialah kejahatan dalam bentuk kekerasan yakni penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini seringkali berupa pemukulan dan kekerasan fisik yang acap kali menyebabkan korban terluka termasuk cacat fisik seumur hidup³ sebagaimana yang termaktub pada Pasal 90 KUHP. Menilik dari beberapa fenomena tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Indonesia, tak jarang dapat kita jumpai pula oknum-oknum yang dengan sengaja merencanakan penganiayaan kepada orang lain atau yang lebih dikenal dengan istilah "penganiayaan berencana". Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut ialah seperti perasaan dikhianati, direndahkan, perselisihan,

¹ Abi Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2017), hal. 100.

² Teguh Sulistia dan Aria Zurmetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2011, hal. 53.

³Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.1, 2013, hal.2.

sampai dengan dendam lama yang mendorong pelaku untuk melakukan penganiayaan berencana sebagai wujud pembalasan dan tak jarang hal tersebut menyebabkan luka berat pada Korban.

Membahas mengenai tindak pidana, tentu akan berkaitan pula dengan konsep dasar di dalam Hukum Pidana itu sendiri. Secara konseptual, setiap tindak pidana atau perbuatan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejatinya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun menurut Remmelink unsur objektif yang diwujudkan oleh *actus reus* dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut di hukum,⁴ hal serupa dipaparkan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan sosial (*social handlungsleer*).⁵ Sedangkan unsur subjektif yang diwujudkan oleh *mens rea* memiliki arti sebagai suatu unsur yang melekat pada diri pelaku dan tertanam di dalam hatinya, atau secara sederhana diartikan sebagai sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana serta hal-hal yang mendorong pelaku merealisasikan perbuatannya.⁶ Kedua unsur tersebut sejatinya berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan, di mana keterkaitan keduanya pun dapat digambarkan melalui suatu bentuk ekspresi yaitu "*actus reus non reus facit reum nisi mens sit rea*".⁷

Adagium "*actus non reus facit reum nisi mens rea*" sejatinya memperlihatkan bahwa suatu perbuatan tidak membuat pelakunya bersalah, kecuali pikirannya jahat⁸, istilah *actus reus* dan *mens rea* sebenarnya lebih dikenal pada *common law system*, khususnya negara Inggris, sehingga *actus reus* dan *mens rea* ini bukanlah istilah yang dipelajari di Indonesia. Namun, pada tatanan praktiknya, di Indonesia sendiri kedua istilah ini seringkali muncul dan digunakan dalam proses beracara.⁹

Berbicara mengenai kedudukannya, *mens rea* pada praktik beracara di Indonesia memang diakui sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, pernyataan ini disampaikan oleh Moeljatno di dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada bahwa dengan adanya *mens rea* sejatinya dapat menentukan apakah seseorang patut dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.¹⁰ Di

⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straft Zonder Schuld*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2017, hal. 162.

⁵ *Ibid.*

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti), 2013, hal. 193.

⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straft Zonder Schuld*, hal. 156.

⁸ *Ibid.*

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2015, hal.155.

¹⁰ *Ibid*, hal. 85.

dalam praktik hukum pidana Indonesia, *mens rea* memiliki arti yang cukup luas dan seringkali diwujudkan berupa kesengajaan (*dolus*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 1 KUHP, macam-macam maksud atau *oogmerk* (seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan), merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* (seperti pada kejahatan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dan penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP), dan perasaan takut atau *vrees* (seperti pada rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP).¹¹ Pembuktian dari adanya *mens rea* ini sejatinya digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila seseorang yang benar-benar bersalah dan memiliki niat jahat justru dijatuhi pidana yang tidak sesuai atau sebaliknya.¹²

Secara konseptual, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XX mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan sendiri berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk pokok, antara lain:

- a. Penganiayaan biasa
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati

Sementara berdasarkan karakteristiknya, tindak pidana penganiayaan dibagi pula menjadi beberapa bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penganiayaan ringan
- b. Tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu
- c. Tindak pidana penganiayaan berat
- d. Tindak pidana penganiayaan berat dan direncanakan terlebih dahulu
- e. Tindak pidana penganiayaan yang memberatkan
- f. Pidana tambahan terhadap tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan
- g. Tindak pidana keturutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan lebih dari satu orang

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal.193.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru), 1981, hal. 80.

Dari beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, Penulis berpendapat bahwa pasal yang paling menarik perhatian dan tengah ramai menjadi topik perbincangan ialah Pasal 353 ayat 2 KUHP yakni penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat. Sebab, jika menilik pada tatanan implementasinya, pasal tersebut paling sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan unsur *mens rea* antara satu putusan dengan putusan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 16 Juli 2020 Nomor 372/Pid/2020/PN/Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 24 November 2020 Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, dan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg tertanggal 8 Agustus 2017.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, atas nama Terdakwa Suryanto Als. Iyung Bin Sajuri menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 353 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana Terdakwa telah membuat sebuah susunan rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Korban. Pada kasus ini, Terdakwa yang merupakan mantan kekasih Korban Dhesta Sandra Binti Hermanto, menyiram Korban dengan air keras ke wajah Korban yang menyebabkan Korban mengalami luka bakar pada bagian wajah, leher, punggung, tangan, paha, dan kaki.¹³

Dalam kasus kedua yakni Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, atas nama Terdakwa Angga Saputra menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 353 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana Terdakwa merealisasikan perbuatannya melalui serangkaian tindakan yang direncanakan terlebih dahulu untuk menganiaya Korban. Pada kasus ini, akibat penyiraman air keras oleh Terdakwa kepada wajah Korban mengakibatkan penurunan kemampuan melihat mata kanan dan kiri, luka bakar derajat satu pada kelompok mata, kemerahan pada selaput bening, gangguan aliran darah di kornea bagian mata, dan keruh di hampir seluruh bagian kornea Korban.¹⁴

Pada kasus lainnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/PN. Jkt Utr, atas nama Terdakwa Rahmat Kadir Muhalette menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 353

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, hal. 3-5.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, hal. 3-5.

ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di mana Terdakwa telah menyusun sebuah rencana untuk memberikan pelajaran kepada Korban yakni Novel Baswedan. Pada kasus ini, akibat dari peristiwa penyiraman air keras oleh Terdakwa, Korban Novel Baswedan mengalami luka bakar derajat satu dan dua pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri serta luka bakar derajat tiga pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri akibat berkontak dengan bahan yang bersifat asam.¹⁵

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa memang ketiganya dikenakan pasal yang sama yaitu Pasal 353 ayat 2 KUHP dan dari masing-masing putusan memiliki karakteristik yang relatif sama. Namun jika diperhatikan, terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan *mens rea* yang cukup signifikan. Di mana jika hal ini tetap terjadi, akan berdampak pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain, **Pertama:** Penuntut Umum dalam membuktikan unsur *mens rea* pada perkara penganiayaan berencana. **Kedua:** Perbedaan tersebut berpengaruh pula pada logika berpikir penalaran hukum bagi Hakim dalam merespon setiap indikator atau fakta-fakta yang muncul di persidangan terhadap putusan yang memiliki karakteristik serupa. Sehingga dengan tidak ditentukannya indikator munculnya *mens rea* pada perkara penganiayaan berencana ini, akan menimbulkan kekosongan dalam penggunaan Pasal 353 ayat 2 KUHP secara faktual.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (penelitian hukum kepustakaan). Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian untuk bahan hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal, makalah yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada, dan bahan untuk tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.¹⁶ Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan terpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep tentang kekerasan berencana serta

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hal. 7-10.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2015, hal.114.

pendekatan kasus.¹⁷ Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni sifat penelitian yang terlebih dahulu mengemukakan serta mendeskripsikan permasalahan faktual yang ada secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah yang ada.¹⁸

Pembahasan

1. Pembuktian dan Penerapan unsur *Mens Rea* pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP

Sebelum membahas mengenai bagaimana pembuktian dan penerapan unsur *mens rea* pada perkara penganiayaan Pasal 353 ayat 2 KUHP dikaitkan dengan putusan, baiknya diketahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan. Di dalam rumusan KUHP tindak pidana penganiayaan sejatinya tidak dijelaskan, sehingga untuk menentukan batasan pengertian penganiayaan dipergunakan penafsiran berdasarkan ilmu pengetahuan dan yurisprudensi seperti yang diutarakan para ahli.¹⁹ R. Soesilo berpendapat bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka-luka.²⁰ Sejalan dengan hal tersebut, Lamintang memaknai penganiayaan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.²¹

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa penganiayaan merupakan sebuah kondisi di mana saat dilakukannya suatu perbuatan atau sedang berlangsung hingga selesainya perbuatan itu dilakukan secara sengaja, sehingga hal tersebut merupakan kehendak atau tujuan yang dimaksud oleh pelaku untuk membuat sakit atau luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan orang lain. Adapun dari pemaparan tersebut, maka menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

¹⁷ Peter Mahmud Marzui, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2005, hal. 93.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2008, hal. 105.

¹⁹ Reysa Rachmat Toengkagie, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1132/PID.B/2014/PN.JKT.PST", (Skripsi, Universitas Trisakti, 2016), hal. 12

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hal. 51.

²¹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, hal. 111.

menyimpulkan bahwa ketiga unsur utama yang harus terpenuhi di dalam tindak pidana penganiayaan ialah sebagai berikut:²²

1. Adanya Kesengajaan
2. Adanya Perbuatan
3. Adanya Akibat Perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh.

Dengan adanya unsur kesengajaan yang dinyatakan secara eksplisit di dalam tindak pidana penganiayaan, maka sudah seharusnya Penuntut Umum membuktikan bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menghendaki yang ia lakukan melalui tindakannya.

Proses pembuktian di dalam penanganan perkara pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus sejatinya sama-sama mengacu pada hukum pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, maka pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa sebagaimana termaktub pada surat dakwaan ialah Penuntut Umum. Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang mengenai pembuktian kesalahan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.²³

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting karena pembuktian suatu perkara tidak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Penuntut Umum, di mana dengan adanya beban pembuktian ini menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP termaktub ketentuan bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, di mana hal tersebut menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim.²⁴

²² Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN.Jkt.Utr, hal. 214.

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika), 2000, hal. 273.

²⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia), 1983, hal. 30.

Berbicara mengenai karakteristik dari rumusan Pasal 353 ayat 2 KUHP ialah unsur “direncanakan terlebih dahulu” dan unsur “mengakibatkan luka berat”, di mana menurut pendapat Lamintang menyatakan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu merupakan salah satu bagian yang menunjukkan keberadaan dari unsur *mens rea*.²⁵ Merujuk dari pernyataan Lamintang sejatinya memperlihatkan bahwa untuk menjerat pelaku dengan Pasal 353 ayat 2 KUHP, maka dalam proses pembuktian Penuntut Umum perlu memperlihatkan serta membuktikan keberadaan unsur direncanakan terlebih dahulu dalam perkara penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP.

Menilik dari ketiga putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN/Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, dan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, dapat dilihat kronologi berupa serangkaian tindakan yang direncanakan oleh masing-masing Terdakwa sebagaimana yang dipaparkan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan. Adapun bentuk perencanaan yang digambarkan dari masing-masing putusan ialah sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN.Jkt.Utr²⁶

- Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ronny Bugis
- Terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal Korban
- Terdakwa mempelajari rute masuk dan keluar kompleks termasuk rute untuk melarikan diri setelah melakukan penyerangan kepada Korban
- Terdakwa mengajak saksi Ronny Bugis untuk membantunya
- Terdakwa mencari dan mendapatkan air keras lalu memindahkannya ke dalam mug serta membungkusnya menggunakan plastik berwarna hitam
- Terdakwa bersama Saksi Ronny Bugis menuju ke lokasi yang sudah ditentukan lalu menunggu Korban

b. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta²⁷

- Terdakwa meminjam sepeda motor dari rekannya

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 124.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN.Jkt.Utr, hal. 7-10.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, hal. 3-5.

- Terdakwa membeli air keras
- Terdakwa mempersiapkan kaleng tiner yang sebelumnya telah diisi dengan air keras
- Terdakwa megajak Saksi Mohammad Rizky Regian untuk membantunya
- Terdakwa bersama Saksi Mohammad Rizky menuju ke lokasi yang sudah ditentukan lalu menunggu Korban

c. Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg²⁸

- Terdakwa mencari air keras
- Terdakwa meminjam sepeda motor kepada rekannya dengan maksud agar tidak ketahuan
- Terdakwa memindahkan air keras ke dalam botol bekas air mineral
- Terdakwa membujuk anak jalanan dengan iming-iming upah untuk membantunya melakukan penyiraman air keras
- Terdakwa bersama anak jalanan menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, yaitu kediaman Korban

Dari ketiga putusan di atas, untuk menentukan serta membuktikan bahwa Terdakwa telah merencanakan tindakannya, maka Penuntut Umum dari masing-masing putusan menggunakan indikator yang sama yakni timbulnya maksud/niat Terdakwa sampai dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan merencanakan/ memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatannya. Sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh pula terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dengan tenang memikirkan rencananya dan masih ada waktu pula untuk membatalkan maksudnya itu.²⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, Simons menambahkan bahwa bagi Penuntut Umum yang hendak membuktikan unsur direncanakan terlebih dahulu pada Pasal 353 ayat 2 KUHP ini harus pula diperhatikan bahwa di dalam keputusan Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan terlarang yang telah ia buat dalam kondisi tenang, maka Terdakwa juga harus

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, hal. 3-5.

²⁹ Unsur direncanakan terlebih dahulu di dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP memiliki penjelasan yang hampir sama dengan unsur rencana yang ada pada Pasal 340 KUHP. Lihat R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia), 2013, hal. 241.

sudah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.³⁰

Dalam rangka membuktikan *mens rea* pada unsur direncanakan terlebih dahulu atas Pasal 353 ayat 2 KUHP dalam proses pembuktian, maka Penuntut Umum dari masing-masing putusan harus dapat membuktikan kesalahan Terdakwa berupa merencanakan tindak pidana penganiayaan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukannya dalam persidangan yakni berupa keterangan saksi, alat bukti surat, dan petunjuk³¹, di mana antar alat bukti yang hadirkan harus terdapat persesuaian, sehingga kebenarannya secara yuridis tak terbantahkan, dengan adanya kesesuaian alat-alat bukti tersebut, nantinya dapat membentuk fakta-fakta yang membenarkan serta memperlihatkan dengan jelas serangkaian rencana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk merealisasikan niatnya melalui tindakan nyata dan dapat meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa memang dapat dinyatakan bersalah.³²

Selain Penuntut Umum, pihak lain yang memiliki peran penting ialah Hakim, khususnya dalam penerapan hukum, di mana Hakim akan menerapkan hukum sesuai dengan peristiwa yang ada dan menilainya, lalu pada gilirannya menetapkan hukumnya pada peristiwa yang bersangkutan, sehingga Hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan yang nantinya akan diuraikan melalui pertimbangan hukumnya.³³ Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan Hakim ialah sebuah argumentasi atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³⁴ Dalam praktik, Hakim saat memberikan pertimbangan hukum haruslah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusannya, fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan tersebut didasarkan pula pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang merupakan satu

³⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung : Bina Cipta), 1985, hal. 125.

³¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju), 2003, hal. 10.

³² Eva Pranata, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kekeliruan Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pid/2015, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol 7, No.3, 2019, hal. 89.

³³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hal. 51.

³⁴ Hernawati RAS, "Eksistensi Unsur Mens Rea sebagai Syarat Pidanaan dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Iustitia Omnibus*, Vol. 1, No.1, 2019, hal.21.

rangkaian.³⁵ Fakta hukum tersebut lah yang kemudian oleh Hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dinyatakan bersalah.³⁶

Berdasarkan tiga kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan penerapan mengenai *mens rea* pada Pasal 353 ayat 2 KUHP oleh Hakim dari masing-masing kasus. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta

Pada kasus yang melibatkan Terdakwa Suryanto, Majelis Hakim menafsirkan dan menilai *mens rea* Terdakwa dari susunan rencana Terdakwa yang direalisasikan, hal ini dapat dilihat mulai dari serangkaian cara, alat yang digunakan, dan tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Berdasarkan rencana itu pula, Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa memang benar Terdakwa berniat dan memiliki kehendak untuk melukai berat orang lain yakni Korban Destha, meskipun akibat perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki.³⁷ Selain itu, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta menyatakan bahwa wujud dari kesengajaan melukai berat itu tampak dari cara bagaimana Terdakwa bertindak dan alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakan itu, walaupun akibat dari tindakannya tidak Terdakwa kehendaki, namun Terdakwa sejatinya tetap memiliki pengetahuan bahwa akibat lain akan ditimbulkan dari perbuatannya. Sehingga menurut teori Pengetahuan dalam unsur Kesengajaan, pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya, melainkan hanya dapat membayangkan bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa “menghendaki dan mengetahui”.³⁸

³⁵ Eka Hardianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat: Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks”, (Skripsi, Univeristas Hasanuddin, Makassar, 2013), hal. 63.

³⁶ Salvadoris Pieter dan Erbi Dwita Silambi, “Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No.1, 2019, hal.88

³⁷ Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, hal. 29-31.

³⁸ *Ibid.*, hal. 31.

b. Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg

Sama seperti Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta sebelumnya, pada Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, Majelis Hakim juga menafsirkan dan menentukan bahwa Terdakwa memiliki *mens rea* dari susunan rencana Terdakwa yang direalisasikan, di mana dalam hal ini Hakim menilai bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan nyatanya saling berurutan sesuai dengan maksud Terdakwa sehingga tujuan Terdakwa dapat tercapai. Pada faktanya, Terdakwa memang memiliki tujuan untuk melukai wajah Korban dengan air keras.³⁹

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN.Jkt.Utr

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan yang direncanakan, hal ini terlihat dari serangkaian rencana Terdakwa yang mengakibatkan luka berat pada Korban. Namun Majelis Hakim meyakini bahwa luka berat yang dialami oleh Korban bukan merupakan *mens rea* Terdakwa sejak awal. Pada kasus ini sejatinya memperlihatkan meskipun Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan berencana yang telah mengakibatkan luka berat, mulai dari bagaimana cara Terdakwa bertindak sampai dengan alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakan itu, namun Majelis Hakim dalam menafsirkan dan menentukan *mens rea*-nya tetap yakin bahwa Terdakwa tidak memiliki *mens rea* untuk mengakibatkan luka berat terhadap Korban.⁴⁰

Terlihat bahwa walaupun ketiga kasus tersebut dikenakan pasal yang sama yakni Pasal 353 ayat 2 KUHP, namun nyatanya terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan *mens rea* yang cukup signifikan. Meskipun, ketiga kasus tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama yaitu mulai dari motif Terdakwa yakni dendam pribadi terhadap Korban, kemudian ketiganya sama-sama merencanakan tindakan penganiayaan tersebut, sampai dengan memilih air keras sebagai media yang disiramkan ke arah Korban.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, hal. 19.

⁴⁰ Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN.Jkt.Utr, hal. 222-223.

Dari sini dapat dilihat bahwa pada Putusan Baturaja yang melibatkan Terdakwa Suryanto dan Putusan Batang yang melibatkan Terdakwa Angga Saputra, Hakim di kedua putusan tersebut sama-sama menafsirkan dan menitikberatkan *mens rea* pada perbuatan persiapan yang terlihat dari cara dan alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa, di mana rencana tersebut direalisasikan melalui tindakan yang saling berurutan sesuai dengan maksud dari Terdakwa. Sehingga, tindakannya itu dianggap sebagai niat jahat pelaku untuk melukai berat Korban.

Penafsiran dan penerapan itu tentu berbeda dari Putusan Jakarta Utara yang melibatkan Terdakwa Rahmat Kadir, di mana Hakim pada putusan tersebut terlihat tidak mempertimbangkan cara Terdakwa bertindak dan alat yang digunakan oleh Terdakwa, walaupun Majelis Hakim menyatakan bahwa benar Terdakwa telah membuat susunan rencana, tetapi hal tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melukai Korban, namun hanya ingin memberikan pelajaran, sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tidak ada *mens rea* Terdakwa untuk melukai berat Korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas diperlihatkan bahwa pada dua putusan yakni putusan pada Pengadilan Negeri Baturaja dan Pengadilan Negeri Batang menentukan bahwa *mens rea* muncul pada perbuatan persiapan dalam unsur rencana, sedangkan putusan lainnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara lebih menitikberatkan *mens rea* pada akibat yang ditimbulkan. Penulis berpendapat bahwa diperlukannya parameter penentu munculnya unsur *mens rea*, khususnya pada perkara penganiayaan Pasal 353 ayat 2 KUHP agar kepastian hukum dapat tercapai dan memberikan penjelasan pada kondisi apa Pasal 353 ayat 2 KUHP dapat diterapkan, sehingga Pasal 353 ayat 2 KUHP ini benar-benar diterapkan bagi seseorang yang memang patut dipersalahkan atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 353 ayat 2 KUHP itu sendiri.

2. Parameter Penentu Munculnya unsur *Mens Rea* pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP

Sebelum menentukan parameter munculnya unsur *mens rea* pada perkara penganiayaan Pasal 353 ayat 2 KUHP, maka perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan *mens rea*. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, secara sederhana *mens rea* dapat diartikan sebagai sikap batin dari pelaku atau suatu pikiran yang salah. Tak

hanya itu, *mens rea* sejatinya juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari adanya *mens rea* ini menandakan bahwa tindak pidana terjadi atas dasar kesadaran seseorang terhadap apa yang ia lakukan. Dalam hal ini, *mens rea* baru akan tergambar dengan jelas dari *actus reus*-nya, atau secara sederhana dengan melihat cara perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku, maka akan menentukan pula bagaimana *mens rea*-nya.⁴¹

Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk menentukan unsur *mens rea* pada suatu tindak pidana, maka harus dilihat bagaimana cara tindak pidana tersebut dilakukan, lalu melihat pula pada alasan atau relevansi pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan cara seperti ini lah, *mens rea* dapat diketahui dengan jelas, sehingga tergambar apakah pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tidak dan apakah tindak pidana tersebut dilakukan pada tingkatan yang serius atau tidak.⁴²

Menilik kembali pada ketiga putusan sebelumnya, perlu diketahui bahwa menurut Andi Hamzah, karakteristik dari Pasal 353 ayat 2 KUHP yakni unsur direncanakan terlebih dahulu termasuk ke dalam salah satu jenis kesengajaan yaitu *Dolus Premeditatus*⁴³, di mana tindakan ini memberi suatu nuansa untuk melakukan tindak pidana dengan pertimbangan yang matang. Adapun bentuk kesengajaan yang direncanakan pada masing-masing putusan, akan dipaparkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Tahap Perencanaan Terlebih Dahulu Pada Beberapa Putusan Tahun 2017-2020

No	Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta	Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr
1.	Perbuatan Persiapan: Terdakwa meminjam motor, membeli air keras lalu memindahkan air keras tersebut ke dalam kaleng tiner yang kosong, serta mengajak saksi	Perbuatan Persiapan: Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor, mencari air keras lalu memindahkan air keras tersebut ke dalam botol bekas air mineral, dan	Perbuatan Persiapan : Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor, mencari air keras lalu memindahkan air keras tersebut ke dalam mug, dan

⁴¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana), 2016, hal. 137.

⁴² *Ibid*, hal. 140.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2019, hal.16.

Mohammad Rizky Regian untuk melancarkan aksi penyiraman	mengajak anak jalanan untuk membantunya melakukan aksi penyiraman.	mengajak saksi Ronny Bugis untuk membantunya memberikan pelajaran kepada Korban.
2. Alat yang Digunakan: Air keras	Alat yang Digunakan: Air keras	Alat yang Digunakan: Air keras
3. Permulaan Pelaksanaan: Menuju lokasi yang sudah ditentukan lalu menunggu Korban	Permulaan Pelaksanaan: Menuju lokasi yang sudah ditentukan yaitu kediaman Korban	Permulaan Pelaksanaan: Menuju lokasi yang sudah ditentukan lalu menunggu Korban
4. Perbuatan Pelaksanaan: Terjadi penyiraman air keras ke arah wajah Korban	Perbuatan Pelaksanaan: Terjadi penyiraman air keras ke arah wajah Korban	Perbuatan Pelaksanaan: Terjadi penyiraman air keras ke arah wajah Korban

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr

Dari uraian tabel di atas, dalam menentukan munculnya *mens rea* tidak hanya dilihat dalam hubungan keadaan mental pelaku saja, tetapi juga perlu dilihat perilaku dari pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari cara atau tahapan yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan tindak pidana juga dapat menjadi indikator munculnya *mens rea*.⁴⁴ Di mana, pada ketiga putusan di atas, Terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan, adapun unsur ini menurut yurisprudensi sejatinya menunjuk pada cara yang dilakukan untuk mewujudkan perbuatan pidana, di mana dilakukan dengan adanya persiapan terlebih dahulu.⁴⁵

Dari sini dapat kita lihat bahwa ketiga putusan tersebut memperlihatkan serangkaian tindakan yang telah disusun secara terstruktur, sehingga dapat dikatakan pula jika Terdakwa dari masing-masing putusan memang memiliki *mens rea* untuk melakukan penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat yang diwujudkan mulai dari perbuatan persiapan. Hal ini pertama-tama dapat dilihat dari perbuatan persiapan masing-masing putusan, di mana ketiganya memiliki karakteristik yang sama yaitu meminjam motor sebagai kendaraan untuk menuju lokasi yang

⁴⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, hal. 150.

⁴⁵ Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 238/PID.B/2013/PN.Bjb, hal. 15.

sudah ditentukan, membeli air keras lalu memindahkannya ke wadah khusus, mengajak orang lain untuk membantunya melakukan tindakan tersebut, dan mempersiapkan segala peralatan yang dirasa perlu untuk melancarkan aksi penyiraman. Dari sini, merujuk dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dari masing-masing kasus memiliki jeda waktu berhari-hari untuk memikirkan serangkaian tindakannya sampai dengan perbuatan pelaksanaan, hal ini menandakan bahwa setiap Terdakwa dari masing-masing kasus memiliki waktu yang tenang untuk memikirkan rencananya dimulai dari tahap perbuatan persiapan.

Pertanggungjawaban pidana akan dilihat bagaimana *mens rea*.⁴⁶ Indikator penentu munculnya *mens rea* yang kedua ialah alasan atau relevansi pelaku melakukan tindak pidana, hal ini jika dikaitkan dengan ketiga putusan yang ada, maka dapat dilihat dari motif Terdakwa di mana ketiganya memiliki persamaan yakni dendam terhadap Korban dan ingin memberikan pelajaran kepada Korban. Esensi penentuan munculnya *mens rea* ini sejatinya untuk memperlihatkan dari tahap mana Terdakwa memiliki kesengajaan untuk melukai Korban, sehingga atas akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menghendaknya karena dianggap memperhitungkan segala sesuatunya.

Hal lainnya yang perlu dilihat dan dipertimbangkan ialah alat yang digunakan oleh Terdakwa, di mana pada ketiga putusan tersebut Terdakwa sama-sama menggunakan air keras, di mana air keras merupakan suatu kandungan yang membahayakan, jika mengenai kulit bisa menyebabkan gatal-gatal, kemerahan, hingga menimbulkan efek melepuh seperti luka bakar, air keras dengan kandungan asam yang tinggi bisa merusak jaringan lunak seperti mata, lidah, bibir, dan alat kelamin.⁴⁷ Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, sudah sepatutnya jika Terdakwa dari masing-masing putusan yang memilih air keras sebagai media pembalasan dianggap sudah dapat menduga akibat yang ditimbulkan dari penggunaan air keras tersebut. Selain itu, dari ketiga putusan ini sejatinya memperlihatkan bahwa Terdakwa dengan sengaja memikirkan secara tenang dan teliti untuk memilih air keras sebagai media yang digunakan untuk menyakiti Korban, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh air keras jika mengenai kulit.

⁴⁶ Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *JURNAL BELO*, 6(1), 11-31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>

⁴⁷ Maya Ayu Puspita, "Organ Tubuh yang Terkena Asam Sulfat Bisa Rusak", Koran Tempo, diakses 30/12/19.

Selanjutnya, indikator untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar memiliki *mens rea* dalam tindak pidananya, dapat dilihat dari permulaan pelaksanaan yang ia lakukan. Pada ketiga putusan tersebut, ketiga Terdakwa sama-sama menuju lokasi Korban berada, di mana pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kedua Terdakwa sama-sama menunggu Korban di lokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan untuk Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Batang langsung menuju ke kediaman Korban. Hal menarik yang dapat diungkap disini ialah pada saat menunggu Korban, apakah Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa Korban akan melalui tempat tersebut karena Terdakwa dan Korban saling mengenal sebelumnya? atau karena proses pemantauan sebelumnya? dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dari Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dan Pengadilan Negeri Batang sama-sama mengetahui di mana lokasi Korban berada karena antara Korban dan Terdakwa pernah memiliki hubungan spesial. Sedangkan Terdakwa dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengetahui lokasi Korban berada melalui proses pemantauan yang ia lakukan selama sehari-hari. Dari sini sudah jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa masing-masing putusan memperlihatkan bahwa mereka memiliki *mens rea*.

Hal terakhir yang dapat dilihat sebagai indikator penentu *mens rea* ialah perbuatan pelaksanaan, di mana ketiga Terdakwa dari masing-masing kasus telah membulatkan niatnya untuk menyiram Korban tepat ke arah wajahnya. Dengan begitu, sudah dapat diperkirakan dan ditentukan dari serangkaian tindakan tersebut, apakah timbulnya luka berat pada Korban merupakan suatu bentuk kesengajaan dari Terdakwa.

Dari pemaparan ketiga putusan di atas, Penulis berpendapat bahwa keseluruhan serangkaian tindakan berupa rencana yang dilakukan oleh Terdakwa dari masing-masing putusan telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang memiliki *mens rea* untuk melukai Korban, namun Penulis merasa bahwa lebih tepat jika munculnya *mens rea* pada perkara Penganiayaan Pasal 353 ayat 2 KUHP harus memiliki indikator penentu yang pasti. Di mana dari uraian ketiga putusan di atas, perbuatan persiapan dapat ditetapkan sebagai tahap munculnya *mens rea*. Dengan adanya keseragaman indikator penentu munculnya *mens rea* pada Pasal 353 ayat 2 ini sejatinya dapat memberikan penjelasan pada kondisi apa Pasal 353 ayat 2 digunakan. Sehingga saat dihadapkan pada kasus yang memiliki karakteristik rencana, hakim memiliki pemahaman bahwa *mens rea*

sudah ada dimulai dari tahap persiapan dan hakim akan merespon semua yang muncul pada fakta persidangan dengan menggunakan indikator yang sama.

Penutup

Dari ketiga putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid/2020/PN/Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, dan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, terdapat permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji yakni perbedaan penafsiran dan penerapan unsur *mens rea* pada Pasal 353 ayat 2 KUHP. Di mana dengan adanya perbedaan tersebut akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Dengan adanya problematika seputar perbedaan penafsiran dan penerapan dari unsur *mens rea* pada suatu kasus sejatinya memperlihatkan bahwa rumusan ketentuan Pasal 353 ayat 2 ini memerlukan sebuah penjelasan yang lebih rinci mengenai unsur *mens rea* itu sendiri. Di mana dengan adanya penjelasan tersebut, ketentuan pasal lain di luar tindak pidana penganiayaan yang menerapkan unsur *mens rea* dapat dijadikannya sebagai suatu parameter untuk menentukan penerapan unsur *mens rea*.

Pada tatanan praktiknya, Penuntut Umum dan Hakim dari masing-masing putusan masih memiliki perbedaan konsep berpikir. Dari ketiga putusan ini, dapat dikatakan bahwa masih ditemukan adanya ketidakseragaman dalam menerapkan unsur *mens rea* itu sendiri, di mana pada dua putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dan Pengadilan Negeri Batang menentukan bahwa *mens rea* muncul pada perbuatan persiapan dalam unsur rencana, sedangkan putusan lainnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara lebih menitikberatkan *mens rea* pada akibat yang ditimbulkan. Hal ini lah yang sejatinya memperlihatkan bahwa antara masing-masing Penuntut Umum dan Hakim belum memiliki konsep berpikir yang linear, sehingga dengan diperjelasnya penggunaan dari unsur *mens rea* itu sendiri dapat memberikan kepastian hukum. Dalam rangka menentukan unsur *mens rea* dalam tindak pidana, tidak bisa hanya melihatnya sebagai suatu unsur yang ada pada pikiran pelaku tindak pidana dan mempengaruhi *actus reus*-nya saja, namun juga harus dilihat dari bagaimana cara tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku karena *mens rea* hanya dapat dilihat dari *actus reus*-nya. Pada Pasal 353 ayat 2 KUHP ini, *mens rea* diwujudkan dari tindakan yang direncanakan oleh Terdakwa, di mana jika diuraikan dari berbagai putusan, maka dapat ditetapkan bahwa perbuatan persiapan sebagai tahap munculnya *mens rea*.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] David Hutagaol, “Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, 2 (1), 15-17.
- [2] Eva Pranata, “Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kekeliruan Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830K/Pid/2015”, (2019), *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 7(3), 85-91.
- [3] Hernawati RAS, “Eksistensi Unsur Mens Rea sebagai Syarat Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan”, *Jurnal Iustitia Omnibus*, 1 (1), 18-26.
- [4] Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *JURNAL BELO*, 6(1), 11-31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- [5] Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)”, (2013), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(2), 1-8.
- [6] Salvadoris Pieter dan Erbi Dwita Silambi. (2019), “Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Restorative Justice*, 3 (1) , 75-91 DOI: [10.35724/jrj.v3i1.1940](https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940)

Buku

- [7] Abiantoro Prakoso, (2017), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- [8] Agus Rusianto, (2016), *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- [9] Andi Hamzah, (2019), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [10] Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- [11] Margono, (2012), *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Moeljatno, (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

- [13] P.A.F Lamintang, (1985), *Delik-delik Khusus (Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan)*, Bandung: Bina Cipta.
- [14] Peter Mahmud Marzui, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- [15] Romli Atmasasmita, (2017), *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [16] Roeslan Saleh, (1981), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, Jakarta : Aksara Baru.
- [17] R. Soesilo, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- [18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [19] Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- [20] Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press. Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, (2011) *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [21] Yahya Harahap, (2000), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

- [22] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [23] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan

- [24] Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 238/PID.B/2013/PN.Bjb
- [25] Pengadilan Negeri Batang No. 55/Pid.B/2017/PN.Btg
- [26] Pengadilan Negeri Baturaja No. 415/Pid.B/2017/PN.Bta
- [27] Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 372/Pid/2020/PN/Jkt.Utr

Dan Lain-Lain

- [28] Eka Hardianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat: Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks”, (Skripsi, Univeristas Hasanuddin, Makassar, 2013).
- [29] Reysa Rachmat Toengkagie, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1132/PID.B/2014/PN.JKT.PST”, (Skripsi, Universitas Trisaksi, 2016).
- [30] Maya Ayu Puspita, (2019, Desember). Organ Tubuh yang Terkena Asam Sulfat Bisa Rusak, Koran Tempo, Diunduh dari :
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201912/84dccf90b5_8905768aa6.pdf tanggal 12 Januari 2021.